

PERAN LEMBAGA FORMAL DAN NON FORMAL DALAM
PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI KAMPUNG PAREDEAN
DESA BUNTU BATUAN KECAMATAN MALUA PROPINSI
SULAWESI SELATAN

Oleh :

MUHARDI SIANDING
M 111 04 056



PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Lembaga Formal Dan Non formal Dalam
Pembangunan Hutan Rakyat Di Kampung Paredean Desa
Buntu Batuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang
Propinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Muhardi Sianding

Nomor Pokok : M 111 04 056

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Kehutanan pada program studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas
Hasanuddin

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Ir. M. Asar Said Mahbub, MP

Tanggal : 23-11-2009

Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Panitia Ujian Sarjana Lengkap
Program Studi Manajemen Hutan

Ir. Budirman Bachtiar, MS

Tanggal :

ABSTRAK

Muhardi Sianding (M 111 04 056). Peran Lembaga Formal dan Non formal Dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan di bawah bimbingan M. Asar Said Mahbub dan H. Muh. Dassir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan mengetahui peran lembaga formal dan Non formal yang berperan dalam pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Propinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan rakyat kampung Paredean dengan jumlah sampel ditentukan secara purposive sampling sebanyak 20 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan observasi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara deskriptif berdasarkan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses pembangunan hutan rakyat mulai dari perancangan, pelaksanaan, pendanaan, evaluasi dan monitoring, serta mengetahui peranan lembaga formal maupun Non formal yang berperan dalam proses pembangunan hutan rakyat tersebut.

Selanjutnya Untuk lebih meningkatkan peranan kelompok tani dalam hal pelestarian hutan secara berkesinambungan, sebaiknya Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang bekerjasama dengan LSM berperan dalam pendampingan penguatan kelompok tani. Sedangkan PLK berperan sebagai pendampingan dalam hal pembimbingan teknis Kelompok Tani. Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang,

LSM dan PLK tersebut diharapkan terus diberikan kepada Kelompok Tani dalam bentuk penyuluhan dan penyadaran sehingga nantinya masyarakat memiliki pola sikap yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup mereka dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alaamin puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk dan penyajian yang sangat sederhana. Tak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam atas junjungan kita nabi dan rasul termulia, kekasih Allah, Muhammad SAW, yang telah ditunjuk menjadi rahmat bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir di Fakultas Kehutanan Universita Hasanuddin, yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Peran Lembaga Formal dan Non formal Dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan".

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. M. Asar Said Mahbub, MP dan Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si yang telah banyak meluangkan waktunya sebagai pembimbing guna memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP selaku dekan Fakultas Kehutanan
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Mappatoba Sila, M.Sc selaku Penasehat Akademik yang telah membantu selama penulis menjalani masa studi pada fakultas Kehutanan



4. Dosen-dosen beserta seluruh staf dan karyawan fakultas kehutanan
5. Orang tuaku tercinta Papa' Sianding dan mama' Sira atas kasih sayang, kesabarannya, perhatiannya yang tak terbatas, serta doanya yang tulus dan ikhlas untuk memintakan keridhoan Allah atas segala usaha ananda. Seumur hidup hanya kalian yang ananda cintai.
6. Saudara dan saudariku tercinta dan tersayang terima kasih atas segala dukungannya baik moril maupun materil, sepanjang umur hanya kalian yang saya andalkan.
7. Teman-teman seperjuangan, Andra, S.Hut, Nurhayati, St. Dewi Safiati, S.Hut, Sepriani Jome, S.Hut, Muhlis Dahlan, Suardi, S.Hut, Emban Ibnu Rusyid, S.Hut serta seluruh rekan-rekan angkatan 04 terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
8. Helfi Crew, Terima kasih atas segala nuansa persaudaraan dan kekeluargaaannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini masih terdapat kekurangan disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis, sehingga dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Makassar, November 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan Rakyat.....	7
B. Lembaga	9
C. Peran Lembaga Formal dan non formal Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat	10
1. Pengertian Peran Lembaga	10
2. Peran Lembaga Formal Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat	11

3. Peran Lembaga Non formal Dalam Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat	12
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	13
B. Populasi dan Sampel Penelitian	13
C. Metode Pengumpulan dan Jenis Data	14
D. Metode Analisis Data	15
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah	18
1. Letak dan Luas	18
2. Tanah	18
3. Topografi	19
4. Iklim	19
5. Penggunaan Lahan	20
B. Keadaan Sosial Ekonomi	
1. Keadaan Penduduk	21
2. Mata Pencaharian	22
3. Pendidikan	23
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Pengelolaan Hutan Rkyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan	24

B. Proses dan Lembaga yang Berperan Dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan	29
1. Penyusunan Rancangan	29
2. Pelaksanaan Pembuatan Hutan Rakyat	34
3. Pendanaan	40
4. Evaluasai dan Monitoring	42
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1	Data curah hujan kecamatan malua tiga tahun terakhir	20
2	Data penggunaan lahan di kecamatan Malua	21
3	Jumlah penduduk menurut golongan umur	21
4	Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	22
5	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	23
6	Periode pengelolaan hutan rakyat di kampung paredean	28
7	Peran lembaga formal dan Non formal dalam pembangunan hutan rakyat di kampung Paredean desa Buntu Batuan.....	42

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1	Kerangka analisis penelitian	16

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks
1	Daftar kuisisioner/panduan Wawancara
2	Identitas Responden di Kampung Paredean desa Buntu Batuan
3	Peta Lokasi Pembangunan Hutan Rakyat
4	Dokumentasi Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Menurut salah satu laporan Badan Pangan Dunia [FAO] tahun 2006, Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar **181.200.000** hektar dengan luas hutan **88.000.000** hektar mengalami penyusutan sebesar **1,87 juta** hektare pertahun dan angka tersebut hanya bisa dikalahkan oleh negara Brazil yang mengalami penyusutan sebesar 3 juta hektar setiap tahun.

Kerusakan lahan juga terjadi di luar kawasan hutan. Akibatnya, akumulasi kerusakan hutan dan lahan yang terjadi selama ini baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, mencapai 101,73 juta hektar. Seluas 59,63 juta hektar diantaranya terjadi di dalam kawasan hutan. Dengan banyaknya kawasan lahan kritis dan tanah kosong, hutan alam tidak bisa lagi menjadi tumpuan utama untuk memproduksi kayu bagi semua kebutuhan industri kehutanan (Helmi, 2006).

Keberadaan hutan ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti pentingnya hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada

prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibolehkan mengubah fungsi utamanya. Hutan sebagai sumber daya alam juga merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, maupun ekonomi, namun manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila keberadaan hutan itu terjamin, sehingga dari itu diperlukan usaha-usaha pengelolaan yang baik dan bijaksana

Melihat pentingnya peranan hutan, maka pemerintah dewasa ini menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan hutan rakyat. Hutan rakyat yang saat ini mendapat perhatian dalam pengembangannya adalah hutan rakyat yang berbasis pada komoditi kayu, untuk itu pengembangan hutan rakyat di lapangan saat ini lebih difokuskan pada hutan rakyat jati, hutan rakyat sengon dan hutan rakyat campuran. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan hutan rakyat dalam rangka mengurangi selisih antara besarnya penyediaan kayu yang dapat dipasok oleh hutan alam dengan permintaan akan bahan baku kayu tersebut.

Beberapa tahun terakhir, pembangunan hutan rakyat telah dilaksanakan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai lembaga formal dengan melibatkan LSM dan kelompok tani desa atau lembaga Non formal sekitar hutan. Adapun bentuk fasilitas yang diberikan lembaga formal berupa penyediaan dana. Sementara LSM berperan dalam penguatan kelompok tani desa serta sebagai perantara antara pemerintah dan kelompok tani desa dan kelompok tani sebagai operator dalam pembangunan hutan rakyat.

Luas hutan negara di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2001 adalah 3.021.172 ha yang terdiri dari hutan lindung 1.865.180 ha (61,73 persen), hutan produksi 1.053.919 ha (34,88 persen), dan hutan konservasi 102.073 ha (3,39 persen). Luas hutan lindung dan hutan konservasi adalah 1.967.253 ha (31,45 persen) dari total wilayah daratan Sulawesi Selatan.

Enrekang adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan hutan pada tahun 1999 seluas 90.150 ha tetapi sejak tahun 2000 sampai 2002 luasnya berkurang menjadi 87.352 ha. Meskipun Kabupaten Enrekang memiliki hutan yang luas namun sebagian kawasan hutan tersebut sudah dikategorikan kritis. Luas hutan kritis yang ditumbuhi semak belukar mencapai 23.417 ha atau hampir mencapai 30 % dari total Luas hutan. Bila dirinci menurut jenisnya/fungsinya, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar hutan tersebut berupa hutan lindung (72.755 ha) dan sebagian lainnya merupakan hutan produksi biasa (14.597 ha). Pada tahun 2002 di kawasan hutan produksi tersebut diperoleh produksi jati rimba sebanyak 4.048,66 m² dan rotan sebanyak 478 ton.

Malua merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Enrekang yang memiliki potensi baik dari segi pertanian, perkebunan maupun dari sektor kehutanan. Adapun dari segi luas dan potensi, komoditas utama dari sektor pertanian seperti padi seluas 505 ha dengan produksi 2070,5 ton/tahun, jagung seluas 500 ha dengan produksi 2231 ton/tahun, bawang merah seluas 46 hektar dengan produksi 89 ton/tahun dan kacang tanah seluas 38 ha dengan produksi 37,62 ton/tahun. Dari

sektor perkebunan, lada seluas 503 ha dengan produksi 146 ton/tahun, kakao seluas 492 ha dengan produksi 155 ton/tahun, cengkeh seluas 99 ha dengan produksi 29 ton/tahun dan kelapa seluas 55 ha dengan produksi 20 ton/tahun. Sementara dari sektor kehutanan, kecamatan Malua memiliki hutan kemiri seluas 50 ha dengan produksi 14 ton/tahun dan hutan alam yang difungsikan sebagai hutan lindung memiliki luas 70 ha.

Keterlibatan lembaga baik yang formal maupun informal dalam proses pembangunan hutan rakyat sangat menentukan keberhasilan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan. Pengembangan lembaga dilakukan melalui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sulawesi Baru sebagai pendamping dalam pelaksanaan pembangunan hutan rakyat. Desa Buntu Batuan mempunyai 3 kelompok tani yaitu kelompok tani Sipatuo Paredean, kelompok tani Buntu Maro Serren, dan kelompok tani Buntu Batuan Duri-duri. Selain itu juga terdapat kelompok karang taruna, BPD dan LKMD serta PKK. Dalam pembangunan hutan rakyat di desa Buntu Batuan semua kelompok tani yang ada di desa tersebut dilibatkan seperti pada pelaksanaan seperti penanaman dan penyulaman tanaman yang mati.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahawati Masali dan Nursiah Saleh pada tahun 2004 di desa Lasiwa Kabupaten Sidrap menunjukkan betapa pentingnya peranan lembaga, baik lembaga formal maupun informal dalam proses pembangunan hutan rakyat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga formal berperan sebagai fasilitator dengan

memfasilitasi kelompok tani untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional. Bentuk bantuan fasilitasi yang diberikan oleh dinas kehutanan tersebut sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok tani. Selain itu dinas kehutanan juga memberi bantuan edukasi dalam bentuk penyuluhan yang di dalamnya memuat tentang penyampaian informasi tentang hal-hal yang masih awam dipikirkan oleh masyarakat misalnya anggapan bahwa tanaman gamelina adalah tanaman yang tidak memberikan manfaat ekonomis sehingga di sinilah peranan dinas kehutanan memberikan penyuluhan untuk meyakinkan dan memotivasi masyarakat dengan memberikan informasi atau membandingkan dengan daerah lain yang berhasil dengan tanaman gamelina. Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan dalam hal pemercepat perubahan (*enabler*) di mana dalam fungsi tersebut LSM membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka serta membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat. Selain itu LSM juga berperan sebagai perwakilan masyarakat (*representational*) dalam peranannya tersebut LSM berfungsi sebagai penghubung dengan Dinas Kehutanan. Keberadaan LSM tersebut sangat diperlukan karena banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan bantuan dari pihak LSM seperti hal-hal yang berkaitan dengan administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran peran lembaga formal dan Non formal dalam proses pembangunan hutan rakyat, di Kampung Paredean desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

B.Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.
2. Mengetahui peran lembaga formal dan non formal pada pembangunan hutan rakyat.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang proses serta peran lembaga formal dan Non formal pada pembangunan hutan rakyat

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah suatu areal yang di dominasi oleh tanaman berkayu yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak-hak lainnya atau juga pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (Awang, 2002). Hutan rakyat adalah buatan, melalui penanaman tahunan (tanaman keras) di lahan milik, baik secara perorangan, marga, maupun kelompok (Toehadi, 1996). Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk didominasi tanaman perkayuan dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang. Sedangkan hutan rakyat menurut Undang-Undang Kehutanan RI No. 41 tahun 1999 adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai (Anonim, 1999).

Berdasarkan jenis tanaman dan pola penanamannya, hutan rakyat dapat digolongkan ke dalam bentuk hutan rakyat campuran, hutan rakyat murni, dan hutan rakyat dengan system agroforestry atau tumpangsari. Hutan rakyat murni adalah hutan rakyat yang terdiri dari suatu jenis tanaman pokok yang ditanam dan diusahakan secara homogen atau monokultur. Hutan rakyat campuran adalah hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanami secara campuran. Hutan rakyat agroforestry merupakan hutan rakyat yang mempunyai

bentuk usaha kombinasi antara kehutanan dengan usaha tani lainnya, seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu pada suatu lokasi. Hutan rakyat agroforestry berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan lahan secara rasional dan ideal, baik dari segi ekonomi maupun ekologi (Hayono, 1996).

Menurut Suryandari dan Puspitojati (2003), riwayat pengembangan hutan rakyat yang bermula dari kegiatan penghijauan lahan kritis milik rakyat melalui penanaman jenis pohon-pohon, ditemukan tiga jenis bentuk hutan rakyat yaitu hutan rakyat murni, hutan rakyat campuran dan hutan rakyat wanatani. Pada hutan rakyat murni ditanami satu jenis tanaman kayu-kayuan, jenis yang dikembangkan adalah sengon dalam luasan yang kecil. Hutan rakyat wanatani memiliki bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya seperti tanaman perkebunan dan tanaman pertanian secara terpadu.

Perkembangan pengusahaan hutan rakyat masih stagnan diakibatkan karena posisi hutan rakyat masih menjadi pilihan budidaya pada lahan marginal. Di samping itu, pengusahaan hutan rakyat ini tidak disebut sebagai bagian dari pengusahaan hutan karena tidak sesuai dengan definisi dan pengertian tentang hutan rakyat itu sendiri. Dalam UU No 41 tahun 1999, hutan rakyat merupakan jenis hutan yang dikelompokkan ke dalam hutan hak. Ini berarti bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang telah dibebani hak milik, yang konsekuensi logisnya adalah bahwa hutan rakyat diusahakan tidak pada tanah negara. Dari pengertian tersebut telah mengabaikan kapasitas pelaku pengusahaan hutan rakyat tetapi lebih menekankan pada kepemilikan lahan. Sebagai contoh, pengusahaan hutan damar

mata kucing (*Shorea javanica*) di Krui Lampung Barat dari segi kepemilikan lahan menjadi bias, apakah termasuk pengusaha hutan rakyat atau tidak. Jika mengikuti pengertian bahwa hutan rakyat adalah hutan yang diusahakan pada lahan milik, maka pengusaha hutan damar mata kucing di Krui tersebut tidak termasuk hutan rakyat, karena sebagian besar dilakukan di atas tanah yang diklaim sebagai tanah negara di satu sisi, tetapi di sisi lain karena pengusaha hutan damar mata kucing ini telah dilakukan sejak lama dan telah dilakukan turun-temurun, masyarakat Krui telah menganggap tanah tersebut merupakan tanah adat atau marga (Darusman dan Harjanto, 2006).

B. Lembaga

Menurut Ruttan dan Hayani (2003), lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakatan atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antara anggotanya untuk membantu dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Soerjono (1990) Lembaga masyarakat bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu; 1) memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. 2) menjaga keutuhan masyarakat. 3) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem

pengendalian sosial (*Social control*). Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.

C. Peran Lembaga Formal dan Non formal Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat

1. Pengertian Peran Lembaga

Menurut Soerjono (1990) Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Adi (2002), peran yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah peran sebagai *community worker* ataupun *enabler* dalam diskursus komunitas. Dalam *community worker* terdapat empat peran besar yang dapat dijalankan, yaitu:

1. Peran-peran fasilitatif (*facilitative roles*)
2. Peran edukasional (*educational roles*)
3. Peran representasional (*representational roles*)
4. Peran teknis (*technical roles*)

Menurut Soerjono (1990), suatu peranan sosial mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

2. Peran Lembaga Formal Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat

Kontribusi lembaga pemerintah adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis tentang pengelolaan hutan rakyat, serta membantu kelompok tani dalam penyusunan perencanaan pengelolaan hutan rakyat. Di samping itu, lembaga pemerintah juga memberi bantuan berupa insentif dalam bentuk proyek yang membantu petani bila ingin melakukan penanaman tanaman berkayu di lahan miliknya. Lembaga pemerintah juga dapat berperan sebagai mediator yang menghubungkan kelompok tani dengan instansi/lembaga lain yang dapat bekerja sama dalam pengembangan hutan rakyat.

Menurut Iskandar dan Siran (2000), bahwa peran lembaga usaha kehutanan dewasa ini dituntut untuk lebih luas, yang bisa menyangkut:

- a. Peran finansial yang datang dari pendapatan hasil hutan
- b. Peran politik dalam artian pengendalian kawasan dan sumberdaya hutan
- c. Peran pengembangan terutama pembangunan pedesaan, disamping pengembangan industri dan pengembangan wilayah
- d. Peran pengembangan sosial-budaya masyarakat
- e. Peran konservasi dan perlindungan lingkungan
- f. Peran mediasi antara masyarakat lokal dan masyarakat industry/usaha.

Kata kunci yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan dan pengembangan kegiatan kehutanan masyarakat atau sistem hutan kerakyatan adalah memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat, serta hak status yang jelas kepada rakyat mengenai pengelolaan hutan. Masa depan pengelolaan hutan Indonesia memang terletak pada kemampuan Departemen Kehutanan mengajak rakyat berpartisipasi aktif mengelola hutan, dan membagi peran kepada rakyat secara adil yang menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan (Awang, 2003).

3. Peran Lembaga Non formal Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat

Pemerintah seringkali mengatakan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab besar terhadap partisipasi masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok sosial, pekerjaan dan sebagainya. Menurut Iswantoro (1996) mengingat keragaman masyarakat tersebut siapa yang berperan dalam pembangunan dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu 1. Masyarakat lokal, 2. Tokoh masyarakat, 3. Personil asing. Ketiga kategori tersebut mungkin tidak semua cocok untuk kegiatan atau program, namun demikian bahwa kombinasi dari ketegori tersebut akan berguna untuk menentukan siapa yang berperan dalam kegiatan pembangunan. Jadi lembaga non formal pemerintah (LSM) dan lembaga lainnya harus berperan aktif untuk menjalankan suatu kegiatan atau program pembangunan hutan rakyat di daerahnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2009 di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Jumlah sampel ditentukan secara purposive sampling atau secara pilih kasih yaitu sebanyak 20 responden yang terdiri dari 1 responden dari lembaga Non formal (LSM), 3 responden dari lembaga formal (Dinas Kehutanan dan PLK), dan 16 responden dari kelompok tani dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anggota masyarakat yang secara langsung melaksanakan pengelolaan hutan rakyat.
2. Informan, tokoh masyarakat yang banyak mengetahui proses pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

3. Penduduk yang bermukim di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

C. Metode Pengumpulan dan Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi dengan lembaga masyarakat menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan meliputi :

- a. Identitas responden (nama, umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan dan jumlah tanggungan keluarga)
- b. Sejarah pembangunan hutan rakyat yang meliputi tahun dan peristiwa.
- c. Proses pembangunan :
 - 1) Penyusunan rancangan atau kegiatan teknis lapangan yang terdiri dari penentuan lokasi penanaman, pengumpulan data dan informasi, penataan areal, rancangan kegiatan, rencana anggaran, dan tata waktu.
 - 2) Pelaksanaan yang terdiri dari persiapan lapangan, pembuatan sarana prasarana, penataan kembali areal tanaman, pemilihan jenis bibit, teknik penanaman, dan pemeliharaan.

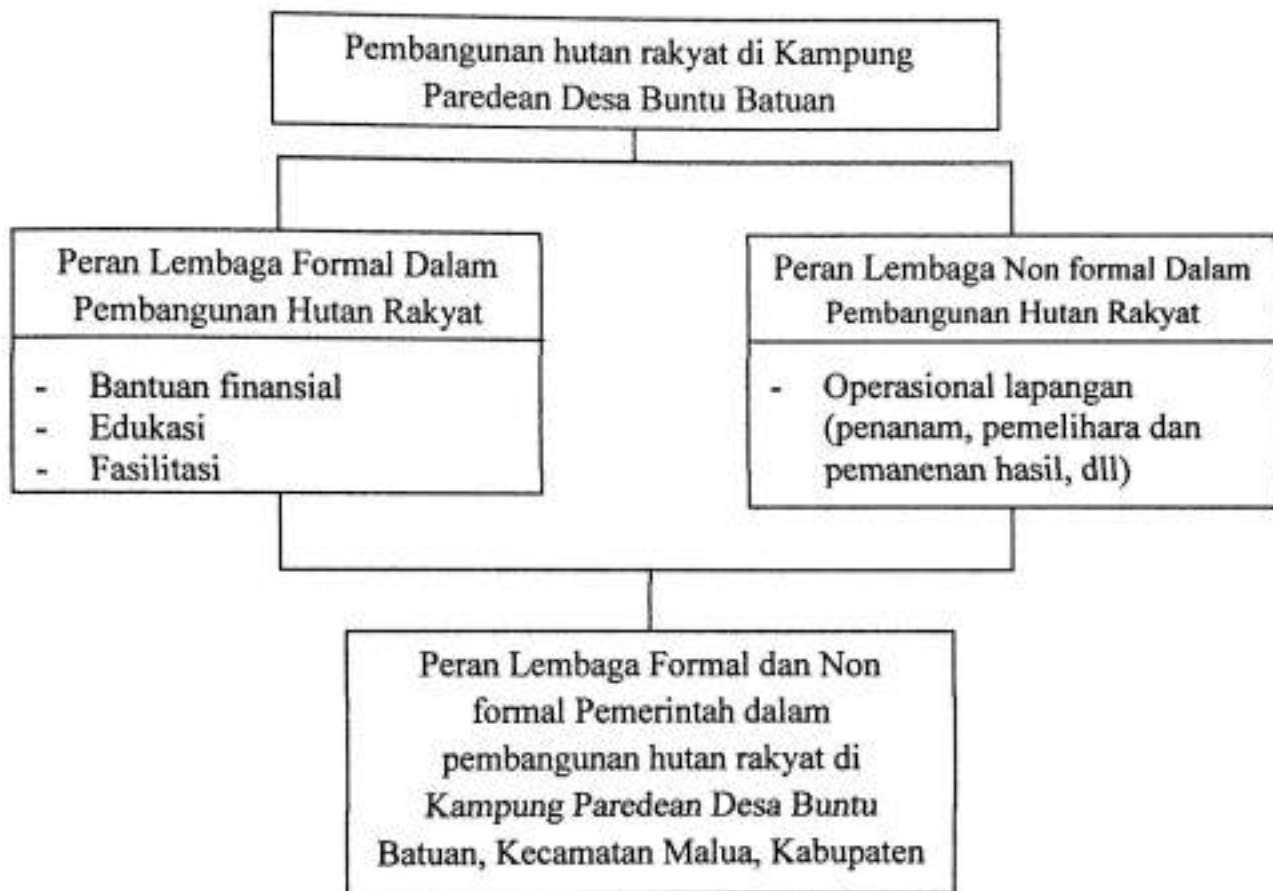
- d. Peran-peran lembaga yang terdiri dari Dinas Kehutanan, BP-DAS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penyuluh Lapangan Kehutanan (PLK) dan Kelompok Tani.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini serta laporan-laporan penelitian yang terkait. Data yang dikumpulkan adalah keadaan umum lokasi penelitian, keadaan sosial ekonomi masyarakat serta dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan Kelompok Tani, Dinas Kehutanan dan BP-DAS.

D. Metode Analisis Data

Data dikumpulkan kemudian dianalisa secara deskriptif berdasarkan atas data primer dan data sekunder. Untuk memudahkan penggambaran masing-masing lembaga, hasil analisa kemudian dideskriptifkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka analisis penelitian disajikan pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka analisis penelitian

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan dari beberapa istilah untuk menghindari kesalahan pengertian dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dijabarkan tentang beberapa istilah yang penting, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga adalah sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan perilaku antar anggota atau antar kelompok.

2. Lembaga formal adalah instansi pemerintahan yang terlibat dalam pembangunan hutan rakyat seperti: BP-DAS, Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang dan Penyuluh Kehutanan Lapangan (PLK).
3. Lembaga Non formal adalah lembaga yang strukturalnya ada yang tidak terwujud, namun dalam penerapannya ada aturan-aturan atau pranata-pranata sosial yang mengikat, memiliki norma dan nilai sosial bagi pemilik lahan hutan rakyat.

Peran lembaga formal dan Non formal adalah sumbangsih yang diberikan suatu instansi untuk menunjang pembangunan hutan rakyat berupa dukungan finansial, edukasi, ataupun fasilitatif.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Lokasi penelitian ini terletak di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Adapun batas-batas wilayah kecamatan Malua sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curio
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baraka
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anggeraja
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Alla

Kecamatan Malua mempunyai luas wilayah yaitu 40,16 km² dengan jarak 41 km dari ibukota Kabupaten yang terdiri dari 8 desa, 5 lingkungan, 16 dusun dan 65 RT.

2. Tanah

Jenis tanah di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang umumnya adalah jenis Podsolik merah kuning dan Mediteran dengan tingkat kesuburan sedang dengan tekstur liat lempung berpasir. Jenis tanah tersebut tersebar di semua desa karena struktur tanah umumnya hampir sama di semua desa di Kecamatan Malua.

3. Topografi

Wilayah Kecamatan Malua pada umumnya mempunyai ketinggian 500 - 1000 meter dari permukaan laut. Keadaan topografi khusus pada lokasi pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Lokasi Buntu Maro Desa Buntu Batuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang agak curam sampai dengan sangat curam serta berbukit dengan ketinggian 500 Meter diatas permukaan laut (mdpl).

4. Iklim

Tipe iklim dan curah hujan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang menurut Schmith dan Ferguson termasuk tipe C. Pada tahun 2005 tercatat 14.17 rata-rata hari hujan dengan curah hujan rata-rata 118.17 mili meter, tahun 2006 tercatat 10.83 rata-rata hari hujan dengan curah hujan rata-rata 78.33 mili meter dan tahun 2007 tercatat 15.67 hari hujan dengan curah hujan rata-rata 135.83 mili meter. Musim hujan mulai pada bulan Januari sampai Agustus dan musim kemarau pada bulan September hingga bulan awal Desember. Adapun data curah hujan pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabe l.



Tabel 1. Data Curah Hujan Kecamatan Malua Tiga Tahun Terakhir

Tahun	2005		2006		2007	
	Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	HH	MM	HH	MM	HH	MM
Januari	10	48	17	132	16	86
Februari	22	106	10	89	14	193
Maret	16	150	9	54	16	135
April	16	97	15	97	22	218
Mei	7	53	20	189	20	171
Juni	14	102	7	105	21	183
Juli	15	167	5	2	21	103
Agustus	10	35	5	25	12	49
September	7	64	8	37	7	142
Oktober	18	277	2	4	8	102
November	16	231	8	45	12	73
Desember	19	88	24	161	19	175
JUMLAH	170	1418	130	940	188	1630
Rata-rata	14.17	118.17	10.83	78.33	15.67	135.83

Sumber : Stasiun Malua, 2008

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Malua meliputi sawah irigasi, sawah tadah hujan, tadah kering, tegalan, pekarangan, padang rumput, hutan dan lain-lain. Jenis dan luas masing-masing penggunaan lahan di Kecamatan Malua dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data penggunaan lahan Kecamatan Malua

No	Desa	Luas (Km)	Sawah Irigasi	Tadah Hujan	Jumlah (Ha)	Tadah Kering (Ha)	Tegalan	Pekarangan	Padang Rumput	Hutan	Lain-lain
1	Bonto	3.8	23	1.1	24.1	350	203	7	131	-	9
2	Kolai	3.81	9.1	2.6	11.7	315	205	7.5	98	-	5
3	Malua	5.25	-	-	-	483.46	287.9	14.5	150	-	7.3
4	Dulang	7.2	50	-	50	370	170	5	50.56	-	5.1
5	Tangru	6.1	-	20	20	586	355	13	137.5	76	4.5
6	Tallung Tondok	5.02	-	-	-	502	355	11	127.98	-	8
7	Rante Mario	3.38	67.5	2.5	70	787.56	358	15	-	-	10
8	Buntu Batuan	5.6	-	40	40	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	40.16	149.6	66.2	215.8	3394.02	1933.9	73	695.79	75	48.9

Sumber : Monografi desa tahun 2008

B. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Malua pada akhir tahun 2008 tercatat sebanyak 8657 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 4257 jiwa, dan perempuan sebanyak 4400 jiwa yang tersebar di delapan desa. Adapun jumlah penduduk diperinci menurut golongan umur disajikan pada table 3.

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut golongan umur

No	Desa/Dusun	Jumlah	Menurut umur (tahun)				
			0-15	16-30	31-45	46-60	>60
1	Malua	1622	547	416	346	195	118
2	Tallung Tondok	1195	439	295	237	149	75
3	Bonto	770	187	265	131	110	77
4	Kolai	1141	318	262	198	97	266
5	Dulang	876	351	216	157	91	61
6	Tangru	1457	618	388	258	136	57
7	Rante Mario	832	255	229	166	94	88
8	Buntu Batuan	764	196	279	115	117	57
	Jumlah	8657	2911	2350	1608	989	799

Sumber : monografi desa tahun 2008 di masing-masing desa

Desa Malua memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 1622 jiwa kemudian disusul Desa Tangru dengan jumlah penduduk sebanyak 1457 jiwa. Desa Buntu Batuan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit dari beberapa desa di Kecamatan Malua dengan jumlah penduduk sebanyak 764 jiwa.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Malua terdiri atas petani, buruh tani, peternak, pedagang, wiraswasta, PNS, TNI, POLRI dan lainnya. Adapun jumlah penduduk yang diperinci berdasarkan mata pencaharian tersebut dapat dilihat pada table 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut mata pencaharian

No	Desa	Jenis Pekerjaan								
		Tani	Buruh Tani	Peternak	Pedagang	Wiraswasta	PNS	TNI	Polri	Lain-lainnya
1	Malua	350	-	-	17	24	65	6	5	101
2	Tallung Tondok	281	8	112	37	-	17	-	-	-
3	Bonto	141	-	-	35	2	35	1	7	15
4	Kolai	501	5	-	2	27	15	1	-	581
5	Dulang	182	-	-	4	2	6	-	-	-
6	Tangru	885	2	-	2	2	11	-	-	2
7	Rante Mario	188	-	-	2	10	22	-	3	3
8	Buntu Batuan	225	-	-	6	6	10	-	-	-
	Jumlah	2753	15	112	105	73	181	8	15	702

Sumber : monografi desa tahun 2008 di masing-masing desa

Mata pencaharian utama penduduk di kecamatan Malua yaitu sektor pertanian yang mencapai 2753 orang.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Malua terdiri atas tingkat taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Universitas. Adapun jumlah penduduk diperinci menurut tingkat pendidikan disajikan pada table 5.

Tabel 5. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Desa	Jumlah	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan						
			TK	SD	SLTP	SMU	S1	S2	S3
1	Malua	407	30	38	175	129	35	-	-
2	Tallung Tondok	820	40	290	130	215	145	-	-
3	Bonto	227	12	77	37	49	52	-	-
4	Kolai	286	18	157	61	38	12	-	-
5	Dulang	326	21	169	77	54	5	-	-
6	Tangru	545	45	280	108	59	53	-	-
7	Rante Mario	532	46	160	82	211	33	-	-
8	Buntu Batuan	548	21	181	99	220	27	-	-
	Jumlah	3619	233	1352	769	975	362		

Sumber : data base PKL Kecamatan Malua

Penduduk Kecamatan Malua yang berpendidikan berjumlah 3619, ini diperinci dari jumlah penduduk yang berpendidikan tingkat Taman Kanak-kanak sejumlah 233 orang, Sekolah Dasar dengan jumlah 1352 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan jumlah 769 orang, Sekolah Menengah Umum dengan jumlah 975 dan tingkat Universitas (S1) dengan jumlah 362 orang. Adapun prasarana pendidikan yang tersedia di kecamatan Malua meliputi; taman kanak-kanak sebanyak 8 unit, Sekolah Dasar sebanyak 12 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 2 unit, dan Sekolah Menengah Umum sebanyak 2 unit.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengelolaan Hutan Rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan

Sejarah pengelolaan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan tidak lepas dari penanganan lahan kritis. Pembangunan hutan rakyat umumnya merupakan proyek kegiatan penghijauan dan reboisasi lahan. Pada mulanya pengelolaan hutan rakyat di Desa Buntu Batuan sudah dimulai sejak tahun 1978 dengan selalu mengikuti program nasional yang dicanangkan departemen kehutanan, saat itu melalui program pekan penghijauan nasional. Bapak Drs. Senti yang juga selaku petugas lapangan kehutanan yang bertugas di wilayah Kecamatan Malua mengusulkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang untuk memasukkan kampung Paredean Desa Buntu Batuan sebagai salah satu desa yang diprioritaskan pada pengelolaan hutan rakyat.

Adapun penentuan lokasi penanaman hutan rakyat di Desa Buntu Batuan awalnya menemui jalan buntu karena masyarakat menolak lahan mereka ditanami jenis kayu-kayuan. Mereka beranggapan bahwa suatu saat nanti jika tanaman tersebut sudah besar maka akan mengganggu tanaman jenis semusim, selain itu masyarakat juga khawatir bahwa tanaman yang sudah tumbuh besar tidak bisa mereka manfaatkan karena akan mendapatkan larangan dari pemerintah padahal tanaman tersebut tumbuh di atas lahan milik mereka. Sehingga dari persoalan tersebut Dinas Kehutanan melalui petugas lapangan terus memberikan pemahaman kepada



masyarakat bahwa yang namanya hutan rakyat itu adalah milik rakyat dan dikelola sendiri oleh rakyat serta hasilnya pun dimanfaatkan oleh rakyat.

Secara garis besar perkembangan pengelolaan hutan rakyat di Kampung Paredean dapat dilihat dari dua periode. Periode pertama yaitu periode kritis terjadi sebelum tahun 1978, kedua periode penanaman intensif berlangsung dari tahun 1978 sampai sekarang. Periode-periode selama pengelolaan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a) Periode Kritis (sebelum tahun 1978)

Masyarakat Kampung Paredean Desa Buntu Batuan memanfaatkan lahan kosong di sepanjang Buntu Maro untuk ditanami jagung dan ketela pohon karena memang pada saat itu jagung dan ketela pohon merupakan makanan pokok masyarakat di kampung Paredean, sebelum melakukan penanaman kedua bahan pangan tersebut masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar alang-alang yang tumbuh di lokasi tersebut karena masyarakat menganggap cara tersebut mudah, cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar justru mengakibatkan lahan semakin kritis apalagi pada mulanya lahan tersebut hanya ditumbuhi alang-alang.

Kegiatan pembakaran untuk pembukaan lahan oleh masyarakat terus dilakukan bahkan untuk mengatasi hama babi yang kerap merusak tanaman jagung dan ketela pohon yang mereka tanam, masyarakat melakukan pembakaran alang-alang yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat

persembunyian hama babi. Aktifitas yang terus berlangsung tersebut semakin memperparah kondisi sehingga lahan-lahan itu semakin sulit lagi untuk menghasilkan tanaman seperti jagung dan ketela pohon yang pada akhirnya terjadilah proses pemiskinan di Kampung Paredean.

b) Periode Penanaman Intensif (tahun 1978 – sampai sekarang)

Pada periode ini di Kabupaten Enrekang secara umum telah mengikuti program penghijauan dan reboisasi dimana pada saat itu melalui program Pekan Penghijauan Nasional (PPN) yang dicanangkan pertama kali oleh Presiden Soekarno tahun 1961 dan bahkan sampai sekarang program tersebut masih berlanjut hanya pola-polanya saja yang berubah. Program PPN ini dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, tingkat propinsi dan sampai ke tingkat kabupaten. Khusus untuk Kabupaten Enrekang jenis kegiatan dari program PPN ini yang pernah dilaksanakan salah satunya seperti perlombaan penghijauan secara swadaya di tiap-tiap desa melalui kelompok masyarakat. Namun inti dari semua kegiatan PPN ini adalah melakukan penanaman sehingga peran penyuluh kehutanan sangat diperlukan sebagai motivator masyarakat.

Pada tahun 1979 – 1990 pola yang digunakan yaitu program penanaman bibit secara massal dengan konsentrasi penanaman jenis kayu-kayuan. Pada tahun 1991 – 1996 pola yang digunakan adalah bantuan bibit tanaman industri seperti kopi dan cokelat dimana jenis tanaman tersebut membutuhkan tanaman pelindung sehingga pemerintah pada saat itu selain memberikan

masyarakat bantuan bibit tanaman industri juga pemerintah memberikan tanaman jenis kayu-kayuan sebagai pelindung. Pada tahun 1997 – 2000 pola yang digunakan adalah program padat kerja dimana pada pelaksanaannya masyarakat sangat diharapkan berpartisipasi mengingat pada saat itu Indonesia dilanda krisis sehingga untuk mengefisiensikan anggaran masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja. Pada saat itu jenis tanaman yang ditanam berupa kombinasi antara tanaman kayu-kayuan 70% dan tanaman penghasil buah-buahan 30%.

Jika dilihat keadaan lokasi dengan adanya program-program penghijauan yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 1978 - tahun 1990 bisa dikatakan bahwa program tersebut belum sepenuhnya berhasil karena seharusnya lahan yang ada di sepanjang Buntu Maro yang merupakan lokasi penghijauan di Kampung Paredean sudah menjadi lahan yang hijau dengan ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Kegagalan tersebut disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan hutan yang telah dibangun. Tahun 2004 - sekarang melalui keputusan MENKOKESRA No 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003 maka dicanangkan program perbaikan lingkungan melalui kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dimana dalam kegiatan tersebut sasaran utamanya adalah 38 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dilakukan selama 5 tahun yaitu tahun 2003 – tahun 2007. Kegiatan GN-RHL mencakup dua hal pokok. Pertama, kegiatan pencegahan perusakan lingkungan meliputi sosialisasi

kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum. Kedua, kegiatan penanaman hutan dan rehabilitasi melalui penanaman bibit dan pembuatan bangunan konservasi tanah sampai kelembagaannya.

Perkembangan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Periode Pengelolaan Hutan Rakyat di Kampung Paredean

No	Tahun	Peristiwa
1	Sebelum tahun 1987 (periode kritis)	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat menanam jagung dan ketela pohon - Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar alang-alang yang mengakibatkan kondisi lahan semakin kritis - Selain untuk tujuan membuka lahan, masyarakat juga membakar alang-alang yang diyakini masyarakat sebagai tempat persembunyian hama babi yang mengakibatkan kondisi lahan semakin parah
2	Periode penanaman intensif (1978 – sekarang)	<ul style="list-style-type: none"> - (1961) dicanangkan program PPN, namun tahun 1978 program tersebut baru berjalan di kabupaten Enrekang. khusus Kabupaten Enrekang kegiatan yang dilaksanakan adalah perlombaan penghijauan swadaya dan dilaksanakan di tiap-tiap desa - (1979 – 1990) pola penanaman secara massal - (1991 – 1996) penanaman bibit bantuan berupa tanaman coklat dan kopi serta tanaman kayu-kayuan sebagai pelindung - (1997 – 2000) pola kegiatan padat kerja dimana keterlibatan masyarakat sangat diharapkan. Jenis tanaman yang ditanam berupa tanaman jenis kayu-kayuan 70% dan tanaman buah-buahan 30% - (2004 – sekarang) melalui keputusan MENKOKESRA diberlakukan program GN-RHL.

B. Proses dan lembaga yang berperan dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan

Proses pengelolaan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang mengacu pada pedoman program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH) yang berbasis pada pembuatan tanaman hutan rakyat dan pemeliharannya. Secara hirarkis pembuatan tanaman hutan rakyat dan pemeliharannya didasarkan pada rencana RHL tingkat nasional jangka panjang (> 15 tahun) untuk Sub DAS prioritas, rencana RHL 5 tahun, dan rencana tahunan RHL. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan hutan rakyat di kampung Paredean adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan

Rancangan teknis disusun oleh kepala bidang Kehutanan Kabupaten Enrekang, dinilai oleh BPDAS Saddang lalu disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang. Isi dari rancangan tersebut memuat tentang:

a. Penetapan calon lokasi

Penetapan lokasi kegiatan hutan rakyat di Kampung Paredean mempertimbangkan hal-hal seperti lahan kritis yaitu lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya (fungsi produksi dan pengaturan tata air) akibat dari penggunaan lahan yang kurang baik dan tidak memperhatikan teknik konservasi tanah sehingga menimbulkan erosi dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, tata air dan lingkungan. Tanah milik rakyat yang menurut kesesuaian dan

pertimbangan ekonomis lebih sesuai untuk hutan rakyat, tanah desa yang terlantar dan bukan kawasan hutan Negara dan tanah milik rakyat yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman. Untuk melihat lebih jelasnya keadaan lokasi di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan, dapat dilihat pada lampiran 4 gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat masih banyaknya lahan-lahan yang kosong sehingga perlu dilakukan pengkayaan.

b. Pengumpulan data dan informasi

Data dan informasi ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian lahan tanaman, pola kerja, tata waktu, dan tata norma kehidupan masyarakat sekitar lokasi sehingga diperoleh rancangan, pelaksanaan, dan sistem pelaksanaan yang sesuai. Data dan informasi yang dimaksud adalah:

- 1) Biofisik, yaitu letak dan luas lahan, jenis tanah, iklim dan curah hujan, vegetasi dan penggunaan lahan, topografi, aksesibilitas sarana prasarana.
- 2) Sosial ekonomi masyarakat meliputi penduduk/demografi, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan kelembagaan.

c. Penataan areal

Penataan areal dimaksudkan untuk menentukan batas areal, luas, dan petak. Kegiatan penataan areal terdiri dari:

- 1) Pengukuran, penataan dan pemancangan patok batas luar, dan petak yang dituangkan dalam peta rancangan dengan polygon tertutup.
- 2) Penataan pola tanam, tata letak dan jarak tanam.
- 3) Pembuatan peta rancangan dengan skala 1:5000

d. Rancangan kegiatan

Rancangan kegiatan disusun sesuai dengan kaidah teknis RHL, Pola tanam yang digunakan pada pembuatan hutan rakyat di Kampung Paredean menggunakan pola tanam hutan campuran/hutan serba guna. Pola tanam ini menggunakan sistem campuran antara beberapa jenis tanaman kayu-kayuan dan jenis MPTS, adapun jenis kayu-kayuan yang ditanam pada lokasi hutan rakyat di Kampung Paredean antara lain pinus, mahoni dan johar. Tanaman ini ditanam dalam satu lahan sesuai dengan kondisi di lapangan, lebar tajuk dan kebutuhan akan cahaya dari masing-masing jenis yang dipilih. Pola tersebut dipilih mengingat lahan pada lokasi hutan rakyat didominasi semak belukar dan atau alang-alang. Perbandingan antara jenis kayu-kayuan dengan jenis MPTS yaitu 70 : 30%, sedangkan sistem penanamannya menggunakan sistem cemplongan dengan membersihkan sekitar tempat yang akan ditanami atau radius \pm 1 meter dari lubang tanaman. Sistem ini digunakan karena kondisi lahan pada kemiringan dan kondisi tanahnya sangat peka erosi.

e. Rencana anggaran biaya

- 1) Sesuai dengan analisis rencana pekerjaan/komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, maka dilakukan analisis kebutuhan bahan dan peralatan per komponen pekerjaan.
- 2) Berdasarkan analisis rencana pekerjaan dihitung kebutuhan tenaga kerja.

f. Tata waktu

- 1) Tata waktu dilaksanakan pada tahun pertama T-1 namun pada kondisi tertentu dapat dibuat pada tahun berjalan T-O

Lembaga yang berperan dalam proses perancangan pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean adalah dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang yang merupakan lembaga pemerintah yang diserahi tugas sebagai pemerintah di bidang kehutanan yang meliputi pengelolaan hutan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 62 tahun 1998 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintah di bidang Kehutanan kepala daerah. Bentuk peranan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang yaitu sebagai perencana sosial (*social planner*). Perencana sosial (*social planner*) adalah lembaga atau orang yang bertugas mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam suatu komunitas, menganalisa, dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani suatu masalah. Peran sebagai perencana sosial (*social planner*) lebih difokuskan pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program. Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang yang berfungsi sebagai perencana



sosial bertugas mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan pembuatan hutan rakyat di Kampung Paredean seperti biofisik dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi biofisik dalam hal ini mengenai letak lokasi yang terletak di Buntu Maro Kampung Paredean dengan ketinggian tempat 500 meter dari permukaan laut. Kondisi biofisik lain yang dapat dilihat pada lokasi pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean yaitu jenis tanah podsolik merah kuning dan mediteran dengan tingkat kesuburan sedang dengan tekstur umumnya liat lempung berpasir. Dari segi iklim, tipe iklim dan curah hujan di lokasi pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean menurut Scmhit dan Fergoson termasuk tipe C dengan curah hujan rata-rata 112,83 mm per tahun, dari segi topografi lokasi pembangunan hutan rakyat di Buntu Maro Kampung Paredean agak curam sampai sangat curam serta berbukit. Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan dapat dilihat dari segi kependudukan/demografi. Jumlah penduduk di Kampung Paredean sebanyak 487 jiwa terdiri dari 241 laki-laki dan 246 jiwa perempuan dengan 104 kepala keluarga, kondisi ini menggambarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar dengan kepadatan penduduk rata-rata 152 jiwa per kilometer. Mata pencaharian penduduk di Kampung Paredean umumnya berusaha di bidang pertanian sebagai petani, lebih 80% penduduknya bekerja sebagai petani selebihnya bekerja sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil. Dari data dan informasi tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk menyusun pedoman pembuatan hutan rakyat.

Dalam pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean kadang-kadang juga Dinas Kehutanan menemui kendala seperti belum tersedianya bibit tanaman pada saat kegiatan penanaman akan dimulai sehingga hal itu sering menjadi masalah tersendiri bagi kelancaran kegiatan pembangunan hutan rakyat di lokasi tersebut. Olehnya itu pengusaha bibit sebagai pihak ketiga yang telah ditenderkan oleh BP DAS dalam penyediaan bibit harus dituntut untuk lebih serius dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pelaksanaan Pembuatan Hutan Rakyat

Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat di Kampung Paredean meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penyiapan kelembagaan

Kelompok tani diarahkan untuk melaksanakan persiapan pembuatan hutan rakyat antara lain:

- a) Mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan
- b) Menyusun rencana kegiatan bersama-sama Penyuluh Kehutanan Lapangan dan pendamping
- c) Menyiapkan lahan miliknya untuk lokasi kegiatan pembuatan hutan rakyat
- d) Mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok
- e) Menyiapkan administrasi kelompok

- f) Menyusun perangkat aturan atau kesepakatan-kesepakatan internal kelompok tani

Penguatan kelembagaan di Kampung Paredean dilakukan oleh LSM Mitra GNRHL bekerjasama dengan Petugas Lapangan Kehutanan (PLK) yang berperan sebagai pendamping kelompok sehingga dari peranan tersebut program pembuatan hutan rakyat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam kegiatan pendampingan, LSM bersama-sama PLK dengan petugas teknis terkait melakukan sosialisasi kepada kelompok tani tentang rencana pembuatan hutan rakyat di wilayahnya serta merespon aspirasi masyarakat. Pendamping harus aktif dalam kegiatan pelatihan petani dan berperan sebagai nara sumber.

2) Pembuatan sarana dan prasarana

Sarana dan prasaran yang dibuat seperti :

- a) Gubuk kerja dibuat dengan bentuk inpres yang difungsikan hanya sebagai tempat istirahat dan berkumpul sesama anggota kelompok tani setelah kegiatan penanaman, bentuk gubuk kerja ini dapat dilihat pada lampiran 4 gambar IV. Sarana prasarana lain yang dibuat adalah papan pengenal yang memuat keterangan tentang lokasi, luas, jenis tanaman, nama kelompok tani dan jumlah peserta serta tahun pembuatan hutan rakyat.

b) Pembuatan jalan di dalam lokasi tanaman hutan rakyat.

3) Penataan kembali areal tanaman

Penataan kembali areal dimaksudkan untuk pengaturan tempat dan waktu. Kegiatan penataan areal tanaman dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

- a) Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan untuk menentukan luas dan letak yang pasti sehingga memudahkan perhitungan kebutuhan bibit.
- b) Pembersihan lapangan dan pengelolaan tanah
- c) Penentuan arah larikan serta pemancangan ajir
- d) Pembuatan piringan tanaman disekitar ajir
- e) Pembuatan lubang tanaman yang ukurannya sesuai dengan keperluan untuk masing-masing jenis tanaman.

4) Pemilihan jenis tanaman

Pemilihan jenis tanaman hutan rakyat di Kampung Paredean disesuaikan dengan usulan dari masyarakat, kesesuaian agroklimat, permintaan pasar, serta menguntungkan yang diwujudkan melalui kesepakatan kelompok. Komposisi jenis tanaman terdiri dari kayu-kayuan termasuk jenis unggulan lokal 70% dan MPTS 30%. Adapun jenis tanaman kayu-kayuan dan MPTS yang memiliki persentase tumbuh yang baik di lokasi Kampung Paredean dapat dilihat pada lampiran 4 Gambar

III untuk jenis Johar (kayu-kayuan) dan gambar V untuk jenis Jambu Menté (MPTS).

5) Teknik penanaman

Penanaman diupayakan dilakukan pada awal musim hujan yang meliputi kegiatan-kegiatan:

- a) Pembersihan lapangan sesuai dengan pola tanam
- b) Pembuatan lubang tanaman
- c) Pemberian pupuk dasar
- d) Pemasangan ajir
- e) Penanaman bibit dengan jarak tanam 5 x 5 meter dengan komposisi kayu-kayuan dan MPTS 70:30%.

6) Pemeliharaan

Tahapan pemeliharaan dilakukan pada tahun berjalan, tahun ke I dan tahun ke II yang meliputi:

- a) Penyiangan, yaitu dengan membersihkan alang-alang atau tanaman pengganggu disekitan tanaman
- b) Penyulaman, yaitu penanaman kembali pada tanaman yang mati atau tumbuh tidak normal. Penyulaman dilakukan pada tahun berjalan yaitu satu bulan setelah penanaman, hal ini dilakukan karena persentase tumbuh tanaman hanya mencapai $\pm 60\%$. Adapun jumlah bibit yang disiapkan untuk penyulaman sesuai dengan kaidah teknis GNRHL pada tahun berjalan sebanyak 10%. Penyulaman ini dilanjutkan pada

tahun pertama dan kedua, hanya saja tingkat persentase tumbuh tanaman di Kampung Paredean setelah pemeliharaan tahun kedua belum mencapai 80% sehingga penyulaman tanaman tidak lagi menggunakan biaya Gerhan tetapi dibiayai oleh pemerintah daerah atau swadaya masyarakat. Bentuk penyulaman ini dapat dilihat pada lampiran 4 gambar II.

- c) Pemupukan, dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang atau pupuk buatan sesuai dengan kebutuhan tanaman.
- d) Penyiraman, dilakukan terutama pada musim kemarau agar tanaman tidak mati.
- e) Perlindungan dan pengamanan
Perlindungan tanaman meliputi kegiatan pemberantasan hama dan penyakit serta pencegahan bahaya kebakaran. Pengamanan dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan terhadap gangguan

Lembaga yang berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan baik yang formal maupun Non formal antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping dalam penguatan kelembagaan. LSM adalah organisasi non pemerintah yang independen dan mandiri, bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah, nonpartisan dan tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai-partai politik dan tidak akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan, LSM berpegang pada prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan hutan rakyat di Kampung Peredean, LSM memberikan Peran Edukatif (*educational role*) yaitu mengadakan pembinaan terhadap kelompok tani dan anggotanya sehingga dapat berkembang dalam menyukseskan kegiatan secara berkesinambungan.

Ketua LSM Sulawesi Baru yaitu bapak Arsun Tukan mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan LSM terhadap kelompok tani adalah memberikan penyuluhan, bimbingan dan diskusi-diskusi tentang kelembagaan. Bimbingan yang diberikan berupa usulan bagaimana mengembangkan kelompok atau organisasi khususnya dalam hal-hal administrasi. Selain peranan edukatif (*educational role*) LSM juga memberikan peranan Mediator yaitu seorang pendamping mampu mengembangkan peran-peran Animasi (peleburan diri ke masyarakat) dan Negoisasi dengan bertumpu pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Mediator, LSM berfungsi sebagai penghubung antara kelompok tani dengan Dinas Kehutanan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan serta membangun komunikasi yang intensif dan produktif antara kelompok tani dan Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang. Kendala yang sering dihadapi oleh LSM dalam hal pendampingan kelompok tani adalah kurang antusiannya anggota kelompok tani terutama ketika ada kegiatan penyuluhan, hal tersebut disebabkan karena kesibukan anggota kelompok yang bekerja sebagai petani.

lembaga formal yang turut berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean adalah Penyuluh Lapangan Kehutanan (PLK).



Tugas dari PLK sama halnya dengan LSM yaitu sama-sama dalam mendampingi kelompok tani, namun PLK lebih fokus dalam memberikan bimbingan teknis di lapangan. Dari peranan tersebut dapat dikatakan bahwa PLK memberikan peranan Teknis (*Technical Role*), yaitu ; peran yang mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat teknis antara lain teknis penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan lain-lain.

Lembaga formal lainnya yang berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean adalah BPDAS Saddang, bentuk partisipasi yang diberikan yaitu memfasilitasi bibit tanaman. Adapun jumlah bibit yang pernah diberikan untuk semua pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Enrekang adalah 140 ribu dari berbagai jenis bibit seperti mahoni, uru, suren, johar, alpukad, durian, petai, sukun dan pinus. Khusus untuk Kampung Paredean jenis dan jumlah bibit yang disalurkan adalah pinus dengan jumlah 7.500 batang, mahoni dengan jumlah 18.300 batang, johar dengan jumlah 5.000 batang. Selain jenis kayu-kayuan tersebut ada juga jenis MPTS seperti durian dengan jumlah 9.000 batang dan petai dengan jumlah 4.200 batang.

3. Pendanaan

Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean desa Buntu Batuan termasuk dalam hal penyediaan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa dinas kehutanan dalam hal pendanaan memberikan peran finansial. Mekanisme pembiayaan dalam setiap kegiatan sebelum tahun 2007 melalui sistem

SPKS dimana dana dituangkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh DJA setiap tahun meliputi komponen pembiayaan administrasi, pelaksanaan fisik, pengembangan kelembagaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2007 dilakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan GNRHL/gerhan dengan sistem kontrak tahun jamak (*multiyears*) dengan pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan di lapangan.

Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat di Kampung Paredean dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pengelolaan hutan rakyat di lokasi tersebut merupakan proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) maka sumber dana dari kegiatan ini murni berasal dari APBN sesuai dengan pedoman GN-RHL. Besar dana yang dianggarkan untuk tahun berjalan di lokasi pembangunan hutan rakyat Kampung Paredean adalah sebesar Rp. 34.500.000,- pada tahun ke-2 besar anggaran adalah Rp. 80.500.000,- jadi besaran anggaran yang dianggarkan untuk tahun berjalan dan tahun ke-2 sebesar Rp. 115.000.000,-. Sementara dana yang dianggarkan untuk persiapan lapangan sebesar Rp. 16.620.000,- dan pemasangan ajir sebesar Rp. 5.920.000,- sumber dana yang sudah ada selanjutnya disalurkan ke masing-masing rekening kelompok tani untuk dikelola secara swadaya. Adapun proses penyaluran dana GN-RHL tersebut, kelompok tani melalui ketua kelompok membuka rekening di Bank BRI, setelah rekening kelompok sudah ada selanjutnya dana tersebut di transfer dari KPN Parepare ke rekening kelompok tani. Untuk mengambil dana yang sudah ditransfer, sebelumnya ketua kelompok tani mengkomunikasikan terlebih dahulu ke Dinas

Kehutanan untuk disepakati berapa jumlah dana yang akan disalurkan. Untuk penentuan besar dana yang disalurkan tersebut harus disesuaikan dengan berapa persen tingkat keberhasilan atau kemajuan fisik di lapangan oleh sebab itu untuk melihat tingkat keberhasilan lahan biasanya Dinas Kehutanan melalui Petugas Lapangan Kehutanan (PLK) melakukan monitoring. Jadi intinya bahwa jumlah dana yang disalurkan disesuaikan berapa persen keberhasilan fisik lahan yang dikelola oleh masyarakat

4. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan hutan rakyat di Kampung Paredean meliputi evaluasi fisik dan non fisik. Evaluasi fisik seperti melihat persentase tumbuh tanaman yang kemudian dibuatkan laporan hasil evaluasi, jika hasil evaluasi menunjukkan persentase tumbuh tanaman dibawah 75% maka selanjutnya tidak ada lagi kegiatan untuk tahun kedepan sementara untuk non fisik seperti melihat perkembangan kelembagaan. Pelaksana evaluasi adalah tim yang telah dibentuk terdiri dari bupati sebagai pembina dan unsur-unsur muspida lainnya, kepala dinas terkait, staf teknisi dan bila dianggap perlu maka dapat menunjuk seseorang yang berkompeten untuk melakukan kegiatan evaluasi. Sementara dalam kaitannya dengan pelaksanaan monitoring pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean, Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah melakukan pengawasan terhadap Dinas Kehutanan, sementara Dinas Kehutanan melakukan pengawasan terhadap LSM dan PLK sebagai pendamping kelompok tani.

Peran lembaga formal dan Non formal dalam pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Peran lembaga formal dan Non formal dalam pembangunan hutan rakyat di

	Lembaga	Peranan	Jenis Kegiatan
1	Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> • Perencana sosial (<i>social planner</i>) • Fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rancangan pembangunan hutan rakyat berdasarkan data-data biofisik dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kampung Paredean. - Memfasilitasi kebutuhan kelompok tani khususnya dalam hal pendanaan
2	BPDAS	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kebutuhan kelompok tani dalam bentuk bibit tanaman
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Edukatif (<i>educational role</i>) • Mediator 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan dan bimbingan berkaitan dengan kelembagaan - Penghubung antara Kelompok Tani dengan Dinas Kehutanan
4	Penyuluh Lapangan Kehutanan (PLK)	<ul style="list-style-type: none"> • Teknisi (<i>technical role</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan teknis lapangan seperti teknis penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan lain-lain kepada kelompok tani.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean sejak tahun 1987 sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan mulai dari Pekan Penghijauan Nasional, penanaman secara massal, penanaman bibit bantuan, kegiatan padat kerja dan yang berjalan sekarang ini adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
2. Proses pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan merupakan proyek pemerintah sehingga tahapan-tahapan mulai dari perancangan, pelaksanaan, pendanaan, evaluasi dan monitoring mengikuti kaidah teknis program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).
3. Lembaga formal yang terlibat dalam pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang dengan peranannya dalam pembangunan hutan rakyat di kampung Paredean adalah sebagai Perencana Sosial (*social planner*) dan peranan Finansial (*financial role*) serta BPDAS berpartisipasi dalam memfasilitasi bibit tanaman. Selain itu lembaga formal lainnya yang terlibat dalam proses pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean adalah Penyuluh Lapangan Kehutanan (PLK) yang berperan sebagai Edukator (pendidik) teknis di lapangan.

4. Lembaga Non formal yang berperan dalam pembangunan hutan rakyat di Kampung Paredean adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan dalam Edukasi (*education role*) dan Mediasi terhadap kelompok tani.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan peranan kelompok tani dalam hal pelestarian hutan secara berkesinambungan, sebaiknya Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang bekerjasama dengan LSM berperan dalam pendampingan penguatan kelompok tani. Sedangkan PLK berperan sebagai pendampingan dalam hal pembimbingan teknis Kelompok Tani. Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang, LSM dan PLK tersebut diharapkan terus diberikan kepada Kelompok Tani dalam bentuk penyuluhan dan penyadaran sehingga nantinya masyarakat memiliki pola sikap yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup mereka dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Awang, S. A. 2002. *Usaha Tani Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan*. Pusat Kajian Hutan Rakyat (Centre For Community Forestry Studies). Fakultas Kehutanan. UGM.
- Convervation For Sumatera, 2008. *Peran Institusional dalam Rangka Pengembangan HKM*. ([http://www. Google.com/forester/peran_institusional dalam rangka pengembangan HKM.htm](http://www.Google.com/forester/peran_institusional_dalam_rangka_pengembangan_HKM.htm)., diakses 10 Agustus 2009.
- Departemen Kehutanan, 1999. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 41, Tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan : Jakarta
- Didik. S dan Dudung. D. 1998. *Kehutanan Masyarakat*. P3KM : Bogor
- Ekawati, S. 1999. *Peranan Hutan Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Sulawesi Selatan*. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan Balai Teknologi Pengelolaan DAS UP. Sul-Sel. Indonesia.
- Hayono, J. 1996. *Analisis Pengembangan Pengusahaan Hutan Rakyat di Kab. Wonosobo Jawa Barat*. Thesis Program Pascasajrana IPB.
- Infokom dan PDE Kab. Enrekang, 2008. *Kondisi Objektif Kabupaten Enrekang*. (online), (<http://www.enrekangkab.go.id/index.php?itemed>., diakses 3 Maret 2009)
- Iskandar, U. dan S. A. Sulistyو. 2000. *Pola Pengelolaan Hutan Tropika*. Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Yogyakarta.
- Propinsi Sulawesi Selatan, 2002. *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*. (online), (<http://www.menlh.go.id/i/art/pdf.1063240938.pdf>., diakses 3 Maret 2009)
- Ruttan, V. W & Hayani, Y., 1985. *Agricultur Development an International perrsperspective (Reviset and Expanded Ed)*. The jhon hopkins University Press. Baltimore and Inggris)

Soerjono. S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV Rajawali, Jakarta

Suryandari, Y. E. dan P. Triyono. 2003. *Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat : Keragaman dan Kelestarian*. Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1. Daftar kuisisioner/panduan wawancara

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Jumlah Tanggungan Keluarga :

B. Sejarah Pembangunan Hutan Rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan

- 1) Siapa masyarakat/tokoh masyarakat yang menjadi inisiator pembangunan hutan rakyat?
- 2) Dari kalangan pemerintah, siapa yang mengusulkan pembangunan hutan rakyat di kampung paredean?
- 3) Kapan tahun dimulainya pembangunan hutan rakyat?
- 4) Kondisi lahan sebelum ditanami?
- 5) Bagaimana respon pemerintah dalam pembangunan hutan rakyat?

C. Proses pembangunan hutan rakyat

a. Proses pemilihan jenis

- 1) Bibit apa yang diinginkan masyarakat?
- 2) Alasan memilih bibit tersebut?
- 3) Dari mana bibit diperoleh?

b. Perencanaan/teknis lapangan

- 1) untuk penentuan lokasi, lahan siapa yang akan ditanami?
- 2) Berapa jarak tanam yang digunakan?
- 3) pola tanam apa yang digunakan?

c. Pelaksanaan

- 1) untuk persiapan lahan sebelum ditanami apakah dilakukan penyemprotan atau pembabatan alang-alang dan tumbuhan rumput lainnya?
- 2) Pembibitan :
 - ✓ Bibit yang diperoleh ditempatkan dimana?
 - ✓ Jika disemaikan, berapa orang yang bertugas untuk memelihara bibit tersebut?
 - ✓ Jika bibit yang diperoleh kurang, maka darimana masyarakat memperoleh penambahan bibit?
- 3) Kapan dimulai penanaman?
- 4) Pemeliharaan :
 - ✓ Setelah penanaman apakah dilakukan pemupukan?
 - ✓ Jenis pupuk apa yang digunakan?

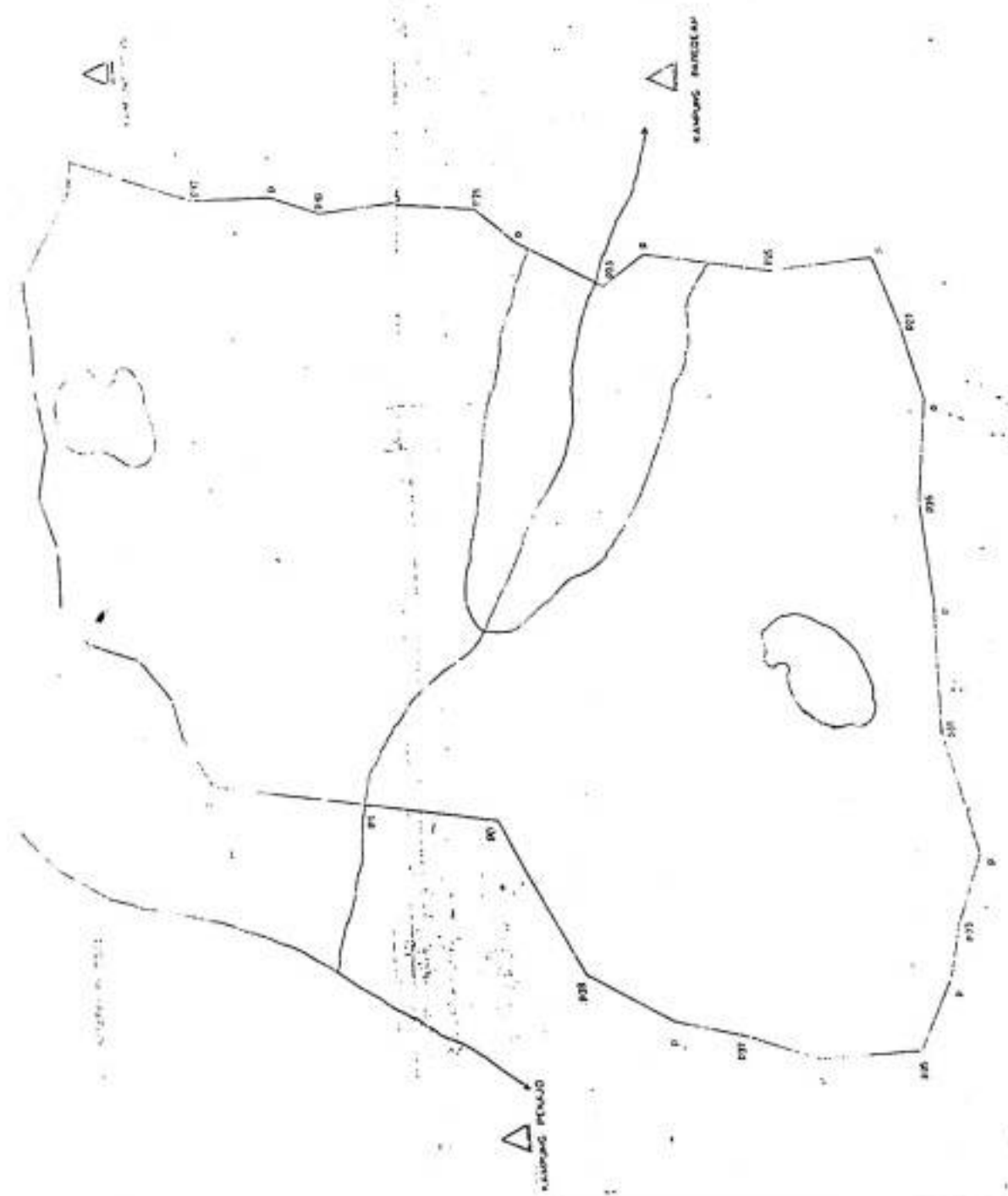
- ✓ Apakah ada perlakuan lain seperti pemangkasan, penyiangan, dan pendangiran?
 - ✓ Berapa kali dilakukan?
- 5) Perlindungan dan pengamanan:
- ✓ Apakah ada aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi hutan rakyat yang dibangun?
 - ✓ Bagaimana sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran?
 - ✓ Dalam hal pengamanan terhadap pencurian kayu, apakah ada pihak keamanan seperti TNI dan Polri yang dilibatkan?
- 6) Pengelolaan dan pemasaran hasil
- ✓ Apakah sudah ada hasil dari hutan rakyat yang dipasarkan?
 - ✓ Adakah pihak perusahaan yang mengajukan penawaran?
- B. Peran-peran lembaga
- a. Lembaga formal
- 1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Enrekang
 - ✓ bantuan finansial yang diberikan dinas kehutanan kepada kelompok tani dalam pembangunan hutan rakyat?
 - ✓ Bentuk fasilitas apa yang diberikan?
 - ✓ Apakah pernah dilakukan penyuluhan atau bimbingan teknis?
 - ✓ Bagaimana peranan dan fasilitas apa saja yang diberikan dinas kehutanan dan perkebunan dalam pembentukan kelompok tani?
 - 2) BP-DAS
 - ✓ Berapa banyak setiap jenis bibit yang disalurkan kepada kelompok tani?
 - ✓ Apakah pernah melakukan penyuluhan atau bimbingan teknis?
 - ✓ Bagaimana peranan dan fasilitas apa saja yang diberikan BP-DAS dalam pembentukan kelompok tani
 - 4) Monitoring dan Evaluasi
 - ✓ Dari hasil evaluasi yang dilakukan apakah ada yang perlu diperbaiki?
 - ✓ Jika ada, kegiatan apa saja yang dilakukan dan bagaimana mekanismenya?
- b. Lembaga informal
1. Apa peranan LSM?
 2. Bagaimana hubungan LSM dengan lembaga formal?
 3. Bagaimana hubungan LSM dengan kelompok tani?
 4. Apa peranan pokok kelompok tani dalam pembangunan hutan rakyat?



Lampiran 2. Identitas Responden di Kampung Paredean desa Buntu Batuan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR (Tahun)	PENDIDIKAN	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN	JUMLAH TANGGUNGAN (ORANG)
1	Drs. SENTI	LAKI-LAKI	54	S1	MENIKAH	PNS	7
2	RAHMAN	LAKI-LAKI	54	SMP	MENIKAH	PETANI	9
3	IRWAN. L	LAKI-LAKI	33	SMA	MENIKAH	PETANI	3
4	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI	35	SMP	MENIKAH	PETANI	3
5	MAHMUDDIN	LAKI-LAKI	32	SMA	MENIKAH	PETANI	2
6	ASRUN TUKAN	LAKI-LAKI	40	S1	MENIKAH	WIRASWASTA	4
7	Ir. Mursalim	LAKI-LAKI	-	S2	MENIKAH	PNS	-
8	Ir. Rosita	PEREMPUAN	-	S1	MENIKAH	PNS	-
9	BURHAN	LAKI-LAKI	35	SMA	MENIKAH	PETANI	3
10	SIAMPA	LAKI-LAKI	52	SD	MENIKAH	PETANI	7
11	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	30	SMA	MENIKAH	PETANI	3
12	NASIR	LAKI-LAKI	29	SMA	MENIKAH	PETANI	2
13	TONDA	LAKI-LAKI	48	SD	MENIKAH	PETANI	4
14	ALIMUDDIN	LAKI-LAKI	45	SMA	MENIKAH	PETANI	3
15	GAWI	LAKI-LAKI	32	SMP	MENIKAH	PETANI	2
16	SUJASMIN	LAKI-LAKI	34	SMA	MENIKAH	PETANI	2
17	ABENG	LAKI-LAKI	51	SMP	MENIKAH	PETANI	8
18	JASMAN. D	LAKI-LAKI	27	SMA	MENIKAH	PETANI	2
19	TAHALI	LAKI-LAKI	44	SMA	MENIKAH	PETANI	5
20	MUKTAR	LAKI-LAKI	35	SMA	MENIKAH	PETANI	2

mpiran 3. Peta lokasi pembangunan hutan rakyat di kampung Paredean desa Buntu Barom



▲ KAMPUNG PENLUS

▲ KAMPUNG PAREDEAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERHUTANAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN
KERANGKANG

LOKASI PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT
TAHUN 2005

KEGIATAN GERAKAN NASIONAL
KEMASERITAN HUTAN DAN LAHAR
 (KEMASERITAN)

LOKASI:
 1. PAREDEAN
 2. RANTE MARU
 3. MALUDA
KEMASERITAN HUTAN RAKYAT
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN

LUAS: 200 Ha **SKALA: 1 : 5.000**

KETERANGAN:

<input type="checkbox"/> Garis Merah	<input type="checkbox"/> Garis
<input type="checkbox"/> Garis Biru	<input type="checkbox"/> Garis
<input type="checkbox"/> Garis Hijau	<input type="checkbox"/> Garis
<input type="checkbox"/> Garis Kuning	<input type="checkbox"/> Garis

REVISI:

1. **REVISI** (10/01/05)

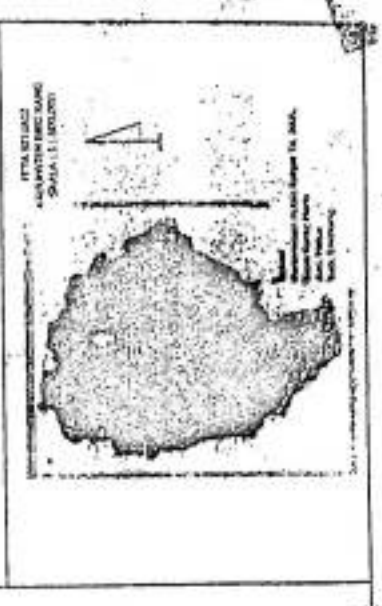
2. **REVISI** (10/01/05)

3. **REVISI** (10/01/05)

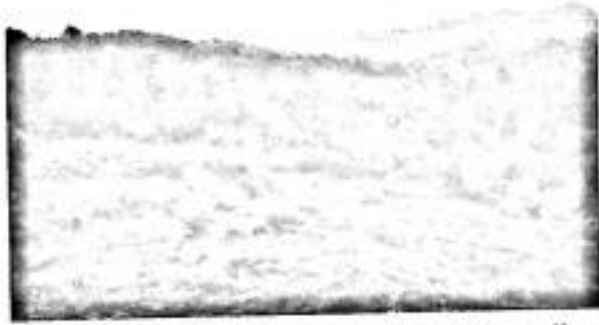
KELOMPOK KERJA
 KEPALA DESA KEMASERITAN
 KEMASERITAN HUTAN RAKYAT
 KEMASERITAN HUTAN RAKYAT

KELOMPOK KERJA
 KEPALA DESA KEMASERITAN
 KEMASERITAN HUTAN RAKYAT
 KEMASERITAN HUTAN RAKYAT

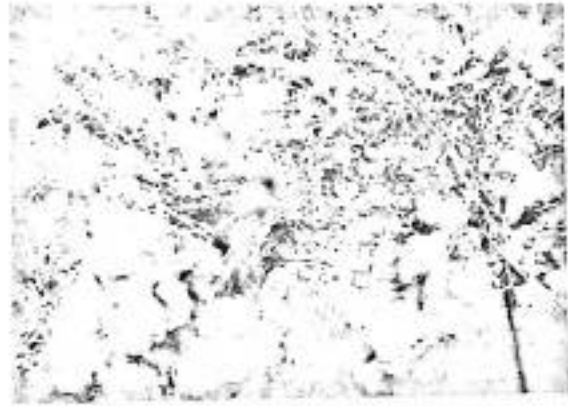
KELOMPOK KERJA
 KEPALA DESA KEMASERITAN
 KEMASERITAN HUTAN RAKYAT
 KEMASERITAN HUTAN RAKYAT



Lampiran 4. Dokumentasi penelitian



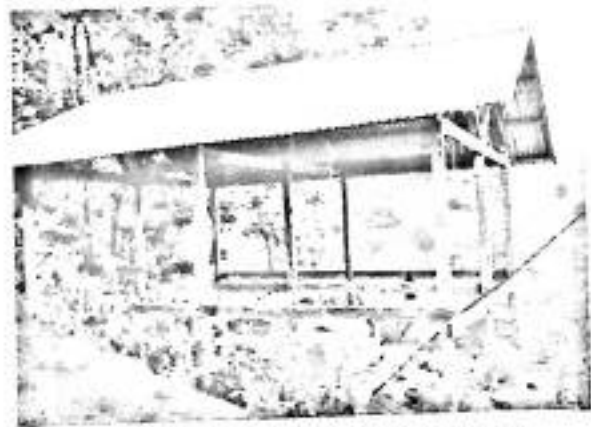
Gambar I. lokasi Pembangunan Hutan Rakyat di Kampung Paredean Desa Buntu Batuan



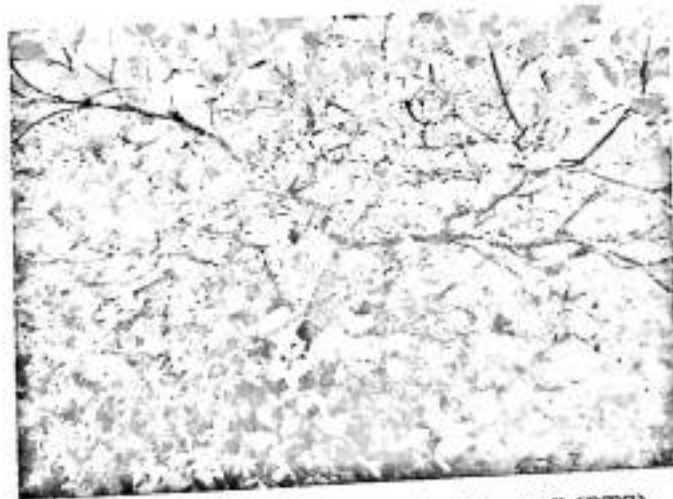
Gambar II. Tanaman Jenis Pinus Yang Telah Disulami



Gambar III. Tanaman Jenis Johar



Gambar IV. Gubuk Kerja Kegiatan Hutan Rakyat



Gambar V. Tanaman Jenis Jambu Mente (MPTS)